



Analisis KR Karakter Yogyakarta



Prof Dr Saratri Wilonoyudho

MEMBANGUN Yogyakarta sebagai basis ekonomi yang kuat memang harus. Namun merevitalisasi Yogyakarta agar menjadi kota yang berkarakter, adalah kewajiban lain yang mestinya tidak boleh ditawar. Situasi dan kondisi Yogyakarta kini tentu lain dengan Yogyakarta di tahun 70-an dan 80-an yang masih kental *guyub rukun*, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sosial.

Yogyakarta era milenial ini sudah tergerus atau bahkan terseret dalam arus kapitalisme dunia. Lihat saja, pembangunan gedung-gedung didesain dengan pendekatan *parcel-to-parcel development* yang cenderung mengisolasi diri dan hanya menjadikan kota sebagai teman berdiri dan bukan teman berdialog. Arsitek Roger Trancik menyebutnya sebagai *isolated object sited in the landscape* (Kamil, 2009).

Rencana Malioboro akan dijadikan sebagai kawasan publik yang bebas kendaraan pada waktu tertentu, nampaknya juga tidak banyak menambah ruang publik yang demokratis,

* Bersambung hal 7 kol 1

Karakter

Sambungan hal 1

mengingat pertumbuhan kota ini luar biasa cepatnya. Wajar jika kekayaan aktivitas urbanitas kota tereduksi. Banyaknya ruang publik egaliter yang tereduksi, memang menjadi masalah di Yogyakarta. Akibatnya warga kota tidak banyak memiliki kesempatan untuk mengembangkan kreativitasnya. Di tahun 70-an ada Umbu Landu Paranggi yang disebut sebagai Presiden Malioboro.

Di jalanan itulah warga Yogyakarta di tahun 70-an menumpahkan kreativitasnya, dan melahirkan para seniman besar di tanah air. Dari fenomena ini nampak bahwa dalam merancang Kota Yogyakarta, harus ada filosofi, wargalah yang menentukan karakter sebuah kota. Kalau filosofi ini dijalankan, maka kota juga akan membentuk karakter warganya. Yogyakarta mestinya banyak ebelajari dari Jakarta. Kegairahan terlalu besar dalam membangun kota yang berorientasi ekonomis, justru malahan menjadi tidak ekonomis. Lihat saja, maraknya gedung pencakar langit, menyebabkan kemacetan lalu lintas, degradasi lingkungan, kriminalitas, kesenjangan sosial, dan sebagainya.

Ruang publik kota berperan penting dalam membangkitkan ekonomi kreatif. Ternyata di beberapa negara lain jauh lebih efektif dalam membangkitkan lapangan kerja daripada ekonomi berbasis industri yang banyak membawa polusi itu. Kini warga Yogyakarta jika ingin berinteraksi, harus merogoh kantong. Karena harus ke kafe atau restoran sebuah hotel.

Di wilayah eRepublik Malioboro tahun 70-an, setiap warga bisa ebendemokrasi dan berinteraksi sangat eekonomis. Dalam isu ruang sosial, kata M Ridwan (2008), kota sebagai ruang publik seharusnya didesain untuk memberi rasa aman, seperti dalam ruang privat di rumah, sehingga warga bersedia keluar rumah. Untuk itu ruang publik harus didesain dengan baik.

Perkembangan Kota Yogyakarta sepertinya di-

dasarkan pada beberapa kegiatan utama: pemerintahan, perdagangan, transportasi, industri, pendidikan dan pariwisata. Pembagian wilayah pengembangan didasarkan atas berbagai pengembangan strategis antara lain: kecenderungan perkembangan kota yang masih tumbuh sebagai konsentrasi padat dari kegiatan sosial ekonomi dan permukiman telah mendorong fungsi kota ke arah luar. Di pinggiran juga tumbuh pusat-pusat perkembangan baru.

Nampak bahwa pertumbuhan Yogyakarta lak-sana sebuah organisme yang kompleks dan rumit. Gejolak dan arah perkembangannya terkadang sulit untuk diprediksi secara akurat. Dengan kata lain penataan fisik mesti dibarengi pula penataan ruang sosial agar polarisasi sosial yang banyak membawa akibat buruk seperti merebaknya kriminalitas, premanisme, dan disorganisasi sosial lainnya dapat dikurangi. Singkatnya mesti ada *intercultural understanding* yang menjadi basis harmonisasi sosial.

Jika tuntutan itu alpa dilakukan, ke depan bisa saja makin lama warga Kota Yogyakarta akan merasakan anomie atau alienasi, yakni gejala keterasingan diri karena ruang kota sangat padat, sementara ruang terbuka makin berkurang. Sedangkan kriminalitas, polusi, kemacetan dan kerusakan lingkungan meningkat. Ujungnya adalah pudarnya kekentalan komunitas atau kolektivitas sosial terhadap ruang perkotaan.

Singkat kata, makin hilangnya sarana interaksi sosial yang demokratis maka akan makin menghilangkan karakter sebuah kota. Orang mestinya paham bahwa gejolak sosial-politik (seperti maraknya *klithis*, premanisme dan seterusnya) salah satunya adalah akibat dari mampatnya saluran aspirasi. Dan ini mesti diantisipasi Yogyakarta.

(Penulis adalah Guru Besar Unnes Semarang, Ketua Koalisi Kepe Indudukan Jateng, Anggota Dewan Riset Daerah Jateng)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Perencanaan Pembangunan 2. UPT. Malioboro	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005